

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama enam puluh tahun, membuatnya menjadi salah satu konflik paling panjang dan kompleks di dunia. Dimulainya konflik Palestina-Israel berawal pada akhir abad ke-19. Berbagai perundingan untuk upaya perdamaian telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun perjanjian damai yang langgeng masih sulit untuk dicapai. Konflik ini ditandai dengan kekerasan, termasuk serangan oleh militant Palestina dan operasi militer oleh Israel.

Sejak tahun 2007, Hamas telah menjadi kelompok yang menguasai wilayah Jalur Gaza. Organisasi ini memiliki sayap militer yang, berdasarkan berbagai sumber, diperkuat oleh sekitar 30.000 personel sebelum terjadinya eskalasi konflik terbaru. Hamas secara terbuka menolak keberadaan Negara Israel dan menyatakan komitmennya untuk mengusir Israel dari wilayah yang diklaim sebagai tanah air Palestina. Selain itu, Hamas juga menuntut pembebasan ribuan tahanan Palestina yang ditahan oleh otoritas Israel. Dalam beberapa kesempatan, Hamas terlibat dalam konfrontasi militer dengan Israel, di antaranya melalui peluncuran ribuan roket ke wilayah Israel. Sebagai bentuk respons, Israel secara berkala melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran yang dikaitkan dengan Hamas, dan pernah mengerahkan pasukan darat ke Jalur Gaza, terutama pada tahun 2008 dan 2014.

Konflik antara Palestina dan Israel telah mencapai puncak ketegangan dan menarik perhatian masyarakat internasional. Perang Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023 merupakan eskalasi terbaru dari konflik tersebut, dan tercatat sebagai

perang terpanjang antara Palestina dan Israel sejak tahun 1948. Serangan roket dan mortir yang dilancarkan oleh Hamas terhadap sejumlah kota dan pangkalan militer di wilayah Israel pada tanggal tersebut menandai dimulainya operasi yang disebut *Operasi Banjir Al-Aqsa*. Operasi ini bertujuan untuk mempertahankan kompleks Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem

Serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel pada tahun 2023 tercatat sebagai serangan paling berdampak besar sejak tahun 1948. Serangan tersebut terjadi bertepatan dengan hari Sabat Yahudi dan hari terakhir perayaan keagamaan Sukkot, sehingga mengejutkan pihak Israel. Dalam 20 menit pertama serangan, Hamas mengklaim telah menembakkan sebanyak 5.000 roket, dengan daya jangkauan hingga 80 kilometer ke wilayah Israel. Sebagai bentuk respons, Israel melakukan serangan udara ke wilayah Jalur Gaza dan menghancurkan Menara Palestina (*Palestine Tower*) yang memiliki tinggi 11 lantai (CNN Indonesia, 2023).

Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada kondisi domestik kedua belah pihak, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Pasca serangan militer yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza, telah menimbulkan berbagai respons dari komunitas internasional. Setiap negara memiliki pendekatan dan kebijakan luar negeri yang berbeda dalam menyikapi isu ini. Perbedaan sikap tersebut mencerminkan posisi politik, kepentingan nasional, serta afiliasi diplomatik masing-masing negara terhadap kedua pihak yang bertikai.

Sejumlah negara secara terbuka mengecam tindakan militer Israel yang dianggap menyebabkan banyak korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil Palestina. Negara-negara Arab secara umum menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Beberapa negara, termasuk Yordania dan Bahrain, dikabarkan telah

menarik pulang duta besar mereka dari Israel sebagai bentuk penolakan terhadap aksi militer yang dilakukan oleh pemerintah Israel.

Amerika Serikat, yang dikenal sebagai sekutu utama Israel, awalnya menyatakan dukungan terhadap langkah Israel dengan dalih mempertahankan diri. Namun, seiring meningkatnya tekanan dari masyarakat internasional, Presiden Joe Biden mengimbau diberlakukannya "jeda kemanusiaan" guna membuka akses bantuan ke Gaza dan mengurangi jatuhnya korban sipil. Negara-negara di kawasan Eropa menunjukkan respons yang beragam terhadap konflik tersebut. Spanyol dan Prancis memberikan dukungan terhadap resolusi gencatan senjata yang diajukan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara Jerman dan Italia memilih untuk tidak mengambil posisi dengan menyatakan abstain. Walaupun secara umum negara-negara tersebut mengecam serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel, mereka juga menyerukan agar Israel bersikap lebih proporsional dan menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan di wilayah permukiman sipil.

Di pihak lain, negara-negara seperti Kanada dan Inggris menyampaikan dukungan terhadap hak Israel dalam mempertahankan diri dari serangan. Kendati demikian, keduanya memilih untuk bersikap netral dengan menyatakan abstain dalam pemungutan suara terkait resolusi gencatan senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencerminkan sikap diplomatik yang berhati-hati.

Sejumlah negara seperti Indonesia, Turki, dan Afrika Selatan secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan aktif mendorong penyelesaian konflik melalui

pendekatan solusi dua negara. Turki juga menyuarakan kritik tajam terhadap tindakan militer Israel serta mendesak dilakukannya penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Gaza. Sementara itu, negara-negara seperti Mesir dan Qatar memainkan peran penting sebagai mediator dalam upaya pencapaian gencatan senjata serta penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak konflik. Berikut merupakan tabel posisi negara negara yang pro dan kontra terhadap Israel.

Tabel 1.1 Posisi Negara-Negara Forum PBB yang pro dan kontra terhadap Israel

No.	Negara Pro	Negara Kontra	Negara Netral
1.	Amerika Serikat	Iran	Swiss
2.	Kanada	Suriah	Norwegia
3.	Britania Raya	Lebanon	Finlandia
4.	Jerman	Aljazair	Denmark
5.	Prancis	Yaman	Irlandia
6.	Italia	Libya	Spanyol
7.	Belanda	Tunisia	Portugal
8.	Austria	Indonesia	Belgia
9.	Ceko	Malaysia	Luxembourg
10.	Hungaria	Pakistan	New Zealand
11.	Polandia	Afganistan	Singapura
12.	Slovakia	Bangladesh	Thailand
13.	Rumania	Brunnei Darussalam	Vietnam
14.	Bulgaria	Kuba	Kamboja
15.	Kroasia	Bolivia	Laos
16.	India	Venezuela	Nepal
17.	Jepang	Korea Utara	Sri Lanka
18.	Korea Selatan	Iraq	Bhutan
19.	Argentina	Sudan	Kazakhstan

20.	Kolombia	Somalia	Uzbekistan
21.	Guatemala	Kuwait	Tajikistan
22.	Honduras	Tunisia	Kirgistan
23.	Mesir	Maroko	Georgia
24.	Yordania	Mauritania	Armenia
25.	Kenya	Kuba	Serbia
26.	Rwanda	Nikaragua	Ekuador
27.	Etiopia	Albania	Paraguay
28.	Panama	Zimbabwe	Bosnia
29.	Filipina	Mali	Chile
30.	Ukraina	Qatar	UEA

(Sumber: UN.org Voting Records)

Ada sekitar 30-40 negara yang pro terhadap Israel secara politik dan ekonomi, dan sekitar 30 Negara tergolong kontra terhadap Israel. Sekitar 100 negara di dunia netral terhadap konflik ini. Negara-negara netral kadang mengkritik tetapi tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, contohnya Turki, Brazil, Afrika Selatan dan Jepang. Dari total 195 negara mayoritas dunia mendukung Solusi dua negara.

Berikut ini adalah daftar negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang menunjukkan sikap pro dan kontra terhadap Israel.

Tabel 1.2 Negara OKI yang Pro dan Kontra

NO	Negara OKI Kontra-Israel (tidak menjalin hubungan diplomatic dengan Israel)	Negara OKI Pro-Israel (menjalinkan hubungan diplomatic resmi atau menyepakati normalisasi)	Negara OKI yang Netral (tidak memiliki hubungan resmi tetapi membuka komunikasi)
1.	Indonesia	Mesir (Perjanjian damai sejak 1979)	Arab Saudi (tidak memiliki hubungan

			resmi tetapi menjalin komunikasi terbatas)
2.	Pakistan	Yordania (perjanjian damai 1994)	Qatar (menjadi mediator antara Hamas dan Israel)
3.	Malaysia	UEA (normalisasi 2020-Abraham accords)	Oman (menjadi tuan rumah dialog)
4.	Bangladesh	Bahrain (normalisasi 2020)	Kuwait (secara resmi menolak hubungan dengan Israel, tetapi cenderung moderat dalam diplomasi)
5.	Maladewa	Maroko (normalisasi 2020)	Azerbaijan (menjaga hubungan erat secara militer dan diplomatic dengan Israel, tetapi tetap anggota OKI)
6.	Afganistan (sangat keras terhadap Israel)	Sudan (normalisasi 2021)	Chad (memulihkan hubungan diplomatic sejak 2019, dan tidak aktif dalam politik di OKI)
7.	Brunnei Darussalam		Uganda (menjalin hubungan diplomatic dan Kerjasama terbatas dengan Israel)
8.	Iran (sangat vocal menentang Israel)		Mesir (Hubungan diplomatik penuh sejak 1979)
9.	Aljazair		
10.	Libya		

11.	Tunisia		
12.	Irak		
13.	Siria		
14.	Yaman		
15.	Lebanon		
16.	Niger		
17.	Somalia		
18.	Djibouti		
19.	Mali		
20.	Senegal		
21.	Gambia		
22.	Sudan Selatan		
23.	Sierra Leone		
24.	Gunea-Bissau		

(sumber: Al Jazeera Voting Breakdown)

Dari pemetaan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap negara-negara anggota OKI terhadap Israel sangat beragam, bergantung pada dinamika politik domestik, tekanan geopolitik, serta kepentingan strategis masing-masing. Meskipun sebagian negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui normalisasi, mayoritas anggota OKI masih mempertahankan posisi kontra, dengan komitmen kuat terhadap perjuangan Palestina sebagai agenda kolektif dalam forum regional maupun internasional.

Upaya penyelesaian konflik tersebut terus dilakukan melalui berbagai mekanisme diplomasi, termasuk negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pemerintah Israel menyetujui gencatan senjata di Jalur Gaza serta kesepakatan pembebasan sandera setelah melalui perdebatan yang berlangsung selama berjam-jam. Keputusan tersebut disetujui oleh kabinet menteri yang terdiri atas 33 orang, dan menandai dimulainya pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata pada hari

Minggu, 19 Januari 2025. Persetujuan ini merupakan hasil dari proses perundingan yang panjang dan kompleks antara pihak Israel dan kelompok Hamas.

Kesepakatan gencatan senjata yang telah disusun mencakup tiga fase utama yang dirancang untuk mengakhiri konflik secara bertahap dan terstruktur. Fase pertama berlangsung selama 43 hari, yang di dalamnya mencakup pembebasan sandera yang terdiri atas perempuan, anak-anak, serta lansia. Selain itu, pada fase ini juga dilakukan penghentian serangan militer guna memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam skala yang lebih luas ke wilayah terdampak.

Fase kedua bertujuan untuk menghentikan perang secara menyeluruh melalui mekanisme pertukaran sandera laki-laki yang ditahan oleh Hamas dengan sejumlah tahanan Palestina yang berada di penjara Israel. Sementara itu, fase ketiga difokuskan pada proses pemulangan jenazah dan sisa-sisa tubuh korban, serta pelaksanaan rencana rekonstruksi terhadap wilayah Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat konflik.

Keseluruhan kesepakatan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek politik, keamanan, dan kemanusiaan, serta didasarkan pada pemahaman bahwa perjanjian tersebut merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan strategis dari operasi militer yang dilancarkan. Informasi ini disampaikan oleh Kabinet Keamanan Israel sebagaimana dilaporkan oleh CNN pada hari Sabtu, 18 Januari 2025.

Permasalahan antara Palestina dan Israel berpotensi membahayakan perdamaian dan keamanan dunia karena konflik ini terus berkembang menjadi konflik regional. Oleh karena itu, PBB hadir dan turut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Sejak didirikan pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadi sumber harapan bagi masyarakat dunia. Kehadirannya diharapkan mampu berperan sebagai wadah yang melindungi kepentingan negara-negara anggotanya (*a reliable International agent*). Meskipun bukan Pemerintahan Global (*world government*), PBB diharapkan dapat mengarahkan dunia dari konfrontasi menuju kerja sama. Itulah yang membuat seluruh negara di dunia berpartisipasi dan menjadi bagian dari keanggotaan PBB.

Dalam upaya mendamaikan konflik Israel dan Palestina, PBB berperan sebagai mediator yang berusaha menjembati kepentingan kedua pihak. Selain itu, PBB telah mengeluarkan banyak Resolusi yang berpengaruh pada konflik Israel-Palestina. Mediasi yang dilakukan oleh PBB merupakan usaha diplomatik untuk penyelesaian konflik antara kedua negara tersebut.

Permasalahan utama dalam upaya PBB menyelesaikan konflik Palestina-Israel terletak pada ketidakmampuannya untuk menegakkan resolusi yang telah diadopsi. Salah satu contoh paling jelas adalah Resolusi 242, yang menyerukan agar Israel mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki selama Perang Enam Hari. Setelah perang berakhir, Israel berhasil menguasai Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Perang Enam Hari ini melibatkan Israel melawan gabungan tiga negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah.

Resolusi tersebut juga menekankan pentingnya kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik setiap negara di wilayah tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (S/RES/242) diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan pada 22 November 1967 di bawah Bab VI Piagam PBB. Resolusi ini

disponsori oleh Duta Besar Inggris, Lord Caradon, dan merupakan salah satu dari lima rancangan yang sedang dipertimbangkan pada saat itu. Meski diadopsi oleh Dewan Keamanan, Resolusi ini tidak pernah sepenuhnya diimplementasikan, dengan Israel tetap mempertahankan kendali atas Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.

Sebagai contoh, meskipun Resolusi 194 menetapkan hak kembalinya pengungsi, lebih dari 70 tahun kemudian hak tersebut belum terwujud dan tetap menjadi isu utama dalam konflik ini. Selain itu, kajian juga akan menyoroti peran Dewan Keamanan PBB, di mana hak veto anggota tetap sering kali menghambat kemajuan resolusi konflik. Menurut data dari *Security Council Report* (2020), lebih dari 20% veto di Dewan Keamanan sejak 1945 terkait dengan isu Palestina-Israel.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Pro-Kontra Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Serangan Balik Israel pada Ghaza Tanggal 07 Oktober 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pro dan kontra negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap serangan balik yang dilakukan Israel di Gaza pada tanggal 07 Oktober 2023?
2. Bagaimana komunikasi Internasional yang dilakukan PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada:

Menganalisis sikap pro dan kontra negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023. Penelitian ini mengkaji negara-negara yang mendukung maupun menolak tindakan tersebut, serta alasan di balik sikap mereka. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana sikap tersebut dinyatakan dalam forum internasional dan dampaknya terhadap dinamika diplomatik di PBB dan stabilitas kawasan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi negara-negara anggota PBB yang mendukung (pro) dan menolak (kontra) tindakan serangan balik Israel.
2. Mengkaji bagaimana sikap pro dan kontra tersebut dinyatakan dalam forum-forum internasional, khususnya di lingkungan PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan dari penulisan dalam proposal skripsi ini maka, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam ilmu hubungan internasional, khususnya terkait dinamika diplomasi multilateral, politik

luar negeri, serta respons komunitas internasional terhadap konflik bersenjata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan, mahasiswa, dan peneliti sebagai bahan referensi dalam memahami dinamika diplomatik negara-negara anggota PBB dalam menghadapi isu kemanusiaan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang posisi dan peran berbagai negara dalam merespons konflik global melalui forum internasional seperti PBB.